

**LAPORAN
TAHUNAN**



2023



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan ke Allah SWT, karena berkat rahmat dan ijin-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB untuk tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang diterbitkan oleh PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dilaksanakan serta kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas PUPR Provinsi NTB.

Demikian laporan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 24 Februari 2023

KETUA PPID DINAS PUPR PROVINSI NTB

Muhammad Taufieq Hidayat, S.Sos., MT.

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAGIAN I GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI	5
1.1 Regulasi	6
1.2 Arah Prioritas Pelayanan.....	6
BAGIAN II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	7
2.1 Sekretariat Layanan.....	7
2.2 Sumber Daya Manusia	8
2.3 Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi NTB.....	9
2.4 Besaran Anggaran	9
BAGIAN III LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	10
BAGIAN IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI.....	12
BAGIAN V KENDALA	12
BAGIAN VI SARAN DAN KESIMPULAN.....	12
6.1 Saran	12
6.2 Kesimpulan.....	13
BAGIAN VII LAMPIRAN	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Regulasi	6
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana PPID Dinas PUPR Provinsi NTB	7
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PPID Dinas PUPR Provinsi NTB	8
Tabel 3.1 Rekapitulasi Kunjungan Website dan Download DIP	10
Tabel 3.2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2022	11
Tabel 7.1 Daftar Permohonan Informasi Tahun 2022	14

BAGIAN I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Transisi demokrasi di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998, telah mengubah paradigma penyelenggaraan negara yang semula tertutup menjadi lebih terbuka serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik. Salah satu produk regulasi dari paradigma baru tersebut adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Dengan kata lain, publik memiliki hak atas informasi dari badan publik.

UU KIP merupakan produk regulasi yang cukup maju dalam mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan negara. Praktik penyelenggaraan negara secara terbuka juga kini tengah digiatkan secara global. Salah satu inisiatif internasional yang dibangun untuk mewujudkan keterbukaan informasi adalah Open Governance Partnership (OGP). Sebagai salah satu negara yang telah berkomitmen terhadap inisiatif OGP, Indonesia bertanggungjawab untuk menjalankan berbagai inisiatif untuk mendorong keterbukaan informasi di dalam negeri. Inisiatif tersebut dituangkan dalam rencana strategis Open Government Indonesia (OGI).

Seluruh kegiatan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi rencana strategis Open Government Indonesia (OGI) berada di bawah koordinasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Salah satu rencana aksi yang telah disusun di tingkat OGI adalah mengoptimalisasikan implementasi UU KIP yaitu mendorong percepatan pembentukan operasional layanan informasi lingkup Pemda melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah (Pemda) dan perangkatnya.

1.1 Regulasi

Tabel 1.1 Regulasi

No	Regulasi
1	Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3	Peraturan Komisi informasi No.1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik
4	Permendagri No. 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6	Peraturan Presiden No. 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
7	Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang 1184/ 8/ 2013 tahun 2013 tentang SOP PPID
8	Keputusan Menteri No. 356 tahun 2014 tentang Organisasi Pengelola PPID

1.2 Arah Prioritas Pelayanan

Tugas dan fungsi pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB pada tahun 2022 antara lain:

Tugas PPID mengelola, mempublikasikan/mengumumkan, melaksanakan pelayanan informasi publik serta dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Fungsi PPID: 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2. Pengolah, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 3. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Provinsi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi, 4. Melaksanakan kewenangan PPID Provinsi yang didelegasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat

BAGIAN II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1 Sekretariat Layanan

Bertempat di jalan Majapahit nomor 8, gedung Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, PPID Dinas PUPR melaksanakan kegiatan harian berupa pelayanan informasi kepada masyarakat.

PPID Dinas PUPR memiliki 4 (empat) staf dan 1 (satu) koordinator untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat baik dalam bentuk offline maupun online. Permohonan dan pemberian informasi harus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Selain pelayanan dengan cara langsung mendatangi instansi Dinas PUPR (offline), masyarakat juga diberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan permohonan informasi melalui sistem elektronik berupa website, facebook maupun instagram (online). Tidak berbeda dengan cara offline, cara online pun harus sesuai prosedur dan petugas PPID membantu mengarahkan masyarakat yang bersangkutan.

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana PPID Dinas PUPR Provinsi NTB

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	Meja, 2 Kursi, PC, Internet, Buku, Lemari Arsip
2	Sarana Operasional Sekretariat PPID	2 PC, 1 AC, 2 Meja Kursi
3	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	Website, Twitter Facebook, Instagram (Dinas PUPR)

2.2 Sumber Daya Manusia

Secara struktural, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Atasan PPID, Ketua PPID, Koordinator dan Staf PPID.

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PPID Dinas PUPR Provinsi NTB

No	Kedudukan Dalam PPIDP Dinas PUPR Provinsi NTB	Jabatan / Nama	Tempat Tugas	Ket
1	Atasan PPID	Kepala Dinas		
2	Ketua PPID	Sekretaris Dinas		
3	Bidang Pelayanan Informasi			
	Koordinator	Kasubbag. Umum	Sekretariat Dinas	
	Anggota :	1. Nyoman Dian Setiawati, ST	Sekretariat Dinas	
		2. Nur Izzati Rahmatun	Sekretariat Dinas	
4	Bidang Pengelola Informasi			
	Koordinator	Sub Koord. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Bid. Tata Ruang	
	Anggota :	1. Juraedah Dwi Anggraeni, ST, MT	Bid. SDA	
		2. Ahmad Suhaili, S.T / Baiq Anisa Dwiz Oktafia, S.T	Bid. SDA	
		3. Agil Harnowo Putra, S.T	Bid. Tata Ruang	
		4. Pande Made Dewandaru, ST	Bid. Bina Marga	
		5. Amelia Chaerani, S.T	Bid. Bina Marga	
		6. Baiq Lusya Agustina, S.T	Bid. Cipta Karya	
5	Bidang Pendokumentasian dan Arsip			
	Koordinator	Sub Koord. Seksi Perencanaan Tek.	Bid. CK	
	Anggota :	1. Kasi Perencanaan Teknis Jalan	Bid. Bina Marga	
		2. Kasi Perencanaan Teknis SDA	Bid. SDA	
		3. Kasi Perencanaan Tata Ruang	Bid. Tata Ruang	
		4. Kasi Perencanaan Teknis Bangkim	Bid. BANGKIM	
		5. Sub Koordinator Pengaturan	Bid. BIKON	
		6. Syadzali	Sekretariat Dinas	Humas
		7. Sahdi	Sekretariat Dinas	Humas
		8. M. Ichsan Adekaputra	Sekretariat Dinas	Humas
		9. Nudzransyah Alif Utama	Sekretariat Dinas	Humas
6	Staf Sekretariat :	1. M. Kausar Ramadhan, S.Kom	Sekretariat Dinas	
		2. Pajenk Diranksyah	Sekretariat Dinas	
		3. Muhammad Mardani	Sekretariat Dinas	
		4. Nawar Basyirah Achmad	Sekretariat Dinas	

2.3 Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi NTB

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Website, FB, IG, TW) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan informasi terkait PUPR. Selain itu, dalam website Dinas PUPR juga telah disediakan Daftar Informasi Publik yang bersifat berkala ataupun serta merta yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh masyarakat. Adapun yang bersifat harian, pemohon informasi akan diarahkan mengisi form permohonan informasi dan data diri. Untuk Daftar Informasi Publik Dinas PUPR Provinsi NTB dapat diakses pada link ini: <http://dpu.ntbprov.go.id/web/page/Daftar-Informasi-Publik>

2.4 Besaran Anggaran

Anggaran PPID Dinas PUPR Provinsi NTB tahun 2022 ini sejumlah Rp. 43.709.250,00, 1% dari total pagu Dinas PUPR Provinsi sebesar Rp. 512.446.772.788,00.

BAGIAN III
LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik dari PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB menerapkan 2 cara, yaitu secara online maupun offline. Online dapat langsung mengirimkan permohonan informasi melalui website, facebook, instagram resmi Dinas PUPR Provinsi NTB. Sedangkan cara offline, masyarakat dapat langsung ke ruang PPID Dinas PUPR Provinsi NTB Unit Kerja Sekretariat.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Kunjungan Website dan Download DIP

No	Bulan	Jumlah Kunjungan (Kali)	Jumlah Download DIP (Kali)
1	Januari	8.757	4.799
2	Februari	6252	3.885
3	Maret	9235	5.169
4	April	8603	4.236
5	Mei	8703	3.989
6	Juni	11421	5.855
7	Juli	11805	5.606
8	Agustus	12417	309
9	September	13704	4.905
10	Oktober	14059	5.242
11	November	10990	5.410
12	Desember	4703	4.849
Total		120.649	54.254

Tabel 3.2 Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2022

PERMOHONAN INFORMASI 2021									
Bulan	Jumlah Permohonan	Media		Guna		Waktu (hari)	Pemberian Informasi		
		Offline	Online	Individu	Lembaga		Penuh	Sebagian	Ditolak
Jan	7	6	1	1	6	2	7	0	0
Feb	3	0	3	3	0	2	1	0	2
Mar	6	1	5	5	1	2	3	0	3
Apr	4	3	1	1	3	2	3	1	0
Mei	1	0	1	1	0	2	0	0	1
Jun	3	2	1	1	2	2	2	0	1
Jul	1	1	0	1	0	1	0	0	1
Agu	4	4	0	4	0	1	1	2	1
Sep	2	2	0	2	0	1	0	0	2
Okt	2	2	0	1	1	1	0	1	1
Nov	1	1	0	1	0	1	0	0	1
Des	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	34	22	12	21	13	0	17	4	13

BAGIAN IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, alhamdulillah tidak pernah ada laporan keberatan ataupun sengketa informasi yang dilewati.

BAGIAN V KENDALA

Terdapat kendala yang dihadapi oleh PPID Dinas PUPR Provinsi NTB selama 1 tahun adalah:

- a. Masyarakat belum memahami prosedur dalam permohonan informasi

BAGIAN VI SARAN DAN KESIMPULAN

6.1 Saran


Melihat kendala yang dihadapi ditempat, beberapa saran yang dianjurkan sebagai berikut:

Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terkait mekanisme permohonan informasi yang disampaikan secara langsung kepada pemohon informasi. Dan Kami Dinas PUPR Provinsi NTB, mempermudah mekanisme permohonan data/informasi bagi masyarakat.

6.2 Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik sudah dijalankan dengan baik. Begitu pula dengan pelayanan informasi publik sudah dijalankan dengan baik, baik secara online maupun offline. Meskipun demikian, tetap diperlukan koordinasi yang cepat dan kuat antara PPID Dinas PUPR beserta Bidang / Balai lingkup Dinas PUPR guna mempertahankan dan meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Mataram, 24 Februari 2023

	<p>Disetujui oleh, Ketua PPID Dinas PUPR Provinsi NTB</p>  <p>Muhammad Taufieq Hidayat, S.Sos., MT. NIP. 19681027 199303 1 005</p>
--	--

**BAGIAN VII
LAMPIRAN**

Tabel 7.1 Daftar Permohonan Informasi Tahun 2022

No	Tanggal	Keperluan		Identitas Pemohon	Informasi yang Dimohonkan	Guna Informasi	Status		Alasan Penolakan
		Perorangan	Lembaga / Instansi				Diterima	Ditolak	
34	11/1/2022	x		Bintang Atha Araminta	Dokumen kajian Pendahuluan, Fakta Analisis, dan akhir terkait Rencana Tata Ruang Kawasan (strategis, kepulauan, ataupun yang lainnya)	Tugas Mata Kuliah Perencanaan Wilayah (untuk di review)		x	Kewenangan Dirtjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
33	10/28/2022	x		Marcelino Nathanaka Santoso	Data mengenai lingkungan aset Utama Karya, Pringgabaya - Lombok Timur. Alamat: Dusun Lendang, Desa Selong, Pringgabaya, Lombok Timur, NTB.	Penggunaan dalam esai mengenai potensi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut di aset tersebut.		x	Dikarenakan hal tersebut diluar kewenangan PUPR Provinsi NTB. Terimakasih
32	10/5/2022		x	Imam Masudi	"1. Laporan tahunan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan di kabupaten Sumbawa tahun 2020-2021 2. Laporan tahunan Operasi dan Pemeliharaan Embung di kabupaten Sumbawa tahun 2020-2021 3. Laporan tahunan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Bor di kabupaten	Adapun tujuan dari permintaan informasi tersebut adalah sebagai bahan analisa dan pengawasan publik bagi lembaga kami.	x		-

					Sumbawa tahun 2020-2021 4. Data tahun 2022 tentang item-item apa saja yang dipelihara baik secara swakelola maupun yang ditender. "				
31	9/26/2022	x		Amirul Aurdi	Detail gambar dari RAB peningkatan jalan Sp JP Kawinda Toi - air terjun jalan desa strategis SP oi saro So Dua dari Desa Strategis Sp Sandue -TPI, Kab Bima, Prov NTB. Yang dikerjakan oleh CV Anzali putra jln taman sejahtera IV no 10 Pejeruk Ampenan.	Kontrol Sosial		x	Kewenangan Kab Bima dan telah diarahkan oleh PPID Utama
30	9/12/2022	x		L Moh Azfintara Rizki Alfateh	laporan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan proyek konstruksi di kota mataram dari tahun 2017-2021	Penelitian Skripsi,, untuk menyelesaikan perkuliahan teknik sipil jenjang S1		x	Kurang Kelengkapan Data Pemohon
29	8/28/2022	x		Annisa Jauza Satriani	Data Batas Administrasi KEK Mandalika dalam bentuk shapefile (.shp) atau geodatabase (.gdb)	Data ditujukan untuk penelitian skripsi sebagai data lokasi penelitian, terutama digunakan di proposal penelitian agar dapat mengikuti seminar proposal		x	Halo sdri Annisa, Informasi dari Bidang Tekait mengenai permintaan data yang dimaksud bahwa sdri Annisa dapat memohon langsung ke

PUPR
Kabupaten
Lombok Tengah
yang menyusun
RDTR.
Terimakasih

28	8/19/2022	x		Muhammad Zamroni	Nama daerah irigasi di sekitar embung Muncan kab Lombok tengah	Tugas kuliah	x		-
27	8/4/2022	x		Bilal Arighi	Mohon info tata cara pembuatan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Orang Pribadi Jasa Kontruksi dan berkas apa saja yang diperlukan.	Sebagai laporan perpajakan		x	Terkait Pembuatan Sertifikat tersebut dapat dilakukan secara ONLINE di LSP atau Asosiasi yang diakui BNSP. Contoh LSP: Intakindo. Terimakasih
26	8/2/2022	x		WIDA FATNI	Data dan atau document mengenai LARAP pada pelebaran jalan Praya - Biao	Untuk memenuhi tugas akhir skripsi		x	STATUS jalan yang dimaksud adalah jalan Nasional yang berarti kewenangannya berada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB.
25	7/26/2022	x		Andre Bba	Ass. Perkenalkn nma sy Akbar Sanjaya kabupaten dompu, profesi LSM. Mhn	Analisa terkait data yang diminta		x	terkait informasi renja, renja 2022

					ijin ser informasi yg berkaitan dgn RENJA Dinas PUPR PROV. NTB thn angg 2022 khusus untk wilayah Dompu. Mksh dan slam hormat sy 🙏				merupakan turunan dari renstra dimana anggaran yang ada masih secara global di rinci per sub kegiatan. Tidak mendetail untuk lokasinya. Terimakasih
24	6/24/2022		x	Lheo Alehandro	bisakah kami mendapatkan layout peta mandalika yg akan kami gunakan dalam penyusunan satuan kepolisian kawasan mandalika	penyusunan satuan kepolisian kawasan mandalika		x	Diarahkan ke Dinas terkait
23	6/7/2022		x	Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB	Permohonan data lokasi indikatif pengadaan tanah	Permohonan Data	x		
22	5/24/2022	x		Dethara Rachmananda Institut Pertanian Bogor	Saya Dethara Rachmananda dari jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor saat ini sedang melaksanakan penelitian tugas akhir. terkait dengan hal tersebut saya ingin mengajukan beberapa data terkait tugas akhir/skripsi saya yang berjudul "Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di Kota Mataram dengan Tambahan Sistem Panen	Permintaan Data untuk Penelitian Tugas Akhir		x	Diluar Kewenangan Dinas PUPR Provinsi dan Diarahkan ke Pihak Terkait

					Hujan sebagai Alternatif Sumber Air". berikut saya lampirkan beberapa data yang ingin saya ajukan dalam surat pengantar dari fakultas. Terima kasih banyak				
21	4/26/2022	x		Anon	data debit bendung pela parado	Kebutuhan informasi	x		Sebagian
20	4/14/2022		x	SETDA Provinsi NTB	Permintaan Data Fisik / Non Fisik dan Keuangan Program Strategis dan Unggulan Daerah Triwulan 1 Tahun 2022	Permintaan Data	x		
19	4/6/2022		x	BPS Provinsi NTB	Permohonan Data Pokok PDRB Triwulan 1 - 2022 Permohonan Data	Permohonan Data	x		
18	4/4/2021		x	Bappenda Provinsi NTB	Permintaan Data	Permintaan Data	x		
17	3/30/2022		x	SETDA Provinsi NTB	Data PPNS	Permohonan Data	x		
16	3/25/2022	x		Mahfuz	NIP Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB	Surat Menyurat	x		
15	3/17/2022	x		Rendy Ilham	Data Iklim	MHS		x	Berada diluar kewenangan Dinas PUPR
14	3/16/2022	x		Listyaning Velisa Pangesti	Data Ruang Terbuka Hijau Provinsi NTB Tahun 2020	Penelitian (MHS)		x	Berada dikewenangan Kabupaten
13	3/16/2022	x		Kevin Nathanael Sibarani	Data terkait data curah hujan dari stasiun hujan	Penelitian (MHS)		x	Berada diluar kewenangan Dinas PUPR

11	3/1/2022		x	Institut Pertanian Bogor	Permohonan Bantuan Data dan Informasi	Permohonan Data	x		
10	2/24/2022		x	Fakultas Pertanian UNRAM	Permohonan Data tentang Proyek Pembangunan Bendungan Meninting	Permohonan Data	x		
9	2/18/2022		x	"Dinas PUPR Kab. Ngada NTT(by Bernardharis Lapu)082144717327"	Saya dari PUPR Kab.Ngada Propinsi NTT,meminta bantuan mungkin bisa kirim contoh SK Forum Penataan Ruang Daerah,terima kasih.	Permohonan Data	x		Data dikirim ke email resmi Dinas PUPR Kab. Ngada
8	2/14/2022	x		"Ikramansyah ikrambima8@gmail.com"	<p>"1. Data curah hujan pada masing-masing stasiun curah hujan di kabupaten Bima pada tahun 2010 sampai 2021.</p> <p>2. Peta maupun data jenis tanah di wilayah kabupaten Bima.</p> <p>3. Peta jaringan irigasi Pelacempaka dan peta jaringan irigasi Pelaparado</p> <p>4. Data Debit Sungai Pelaparado"</p>	Skripsi (MHS Universitas Islam Malang)		x	Terkait permohonan informasi saudara Ikramansyah, untuk data jaringan irigasi Pelacempaka berada di BWS NT 1, data jaringan irigasi Pelaparado berada di Kemen PUPR/ BWS NT 1, dan untuk data curah hujan berada di BMKG. Saudara dapat langsung menghubungi BWS terkait permintaan

									data yang saudara inginkan. Terimakasih
7	1/26/2022		x	BPS Provinsi NTB	Permohonan Data Panjang Jalan Tahun 2020 dan 2021	Permohonan Data	x		
6	1/17/2022		x	BPS Provinsi NTB	Permintaan Data dan Informasi dalam rangka Penyusunan Publikasi Provinsi NTB dalam Angka 2022	Permintaan Data dan Informasi	x		
5	1/14/2022		x	Bappeda Provinsi NTB	Permintaan Data Realisasi DBHCHT Provinsi NTB Semester II Tahun 2021	Permintaan Data	x		
4	1/13/2022		x	Institut Teknologi Nasional Malang	Permohonan Data dan Peta Tempat Evakuasi Sementara (Shelter)	Permohonan Data	x		
3	1/10/2022		x	SETDA Provinsi NTB	Permintaan Data Rencana Program/Kegiatan Kerjasama Daerah Tahun 2021	Permintaan Data	x		
2	1/7/2022		x	SETDA Provinsi NTB	Permintaan Data Bahan Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD Tahun 2021	Permintaan Data	x		
1	1/4/2022		x	Diskomintfotik Provinsi NTB	Permintaan Data Sektoral	Permintaan Data	x		